



# Persepsi Masyarakat Kampung Cieunteung, Kabupaten Bandung tentang Rencana Relokasi Akibat Bencana Banjir

Fanni Harliani<sup>1</sup>

[Diterima: 9 Oktober 2012; disetujui dalam bentuk akhir: 25 Februari 2014]

**Abstrak.** Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkecil dampak banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum khususnya di Kabupaten Bandung adalah dengan rencana memindahkan penduduk ke tempat lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap rencana relokasi permukiman di Kampung Cieunteung. Metodologi penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dan dengan mewawancarai berbagai stakeholder terkait seperti tokoh masyarakat dan beberapa instansi pemerintahan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kampung Cieunteung, Kabupaten Bandung menolak adanya rencana relokasi sebagai upaya menanggulangi bencana banjir. Faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat ini meliputi proses penyebaran informasi, komunikasi antar stakeholder, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, tingkat pendidikan, hubungan sosial masyarakat yang terjalin, serta cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

**Kata kunci.** Pengelolaan risiko banjir, relokasi, Daerah Aliran Sungai (DAS), persepsi masyarakat

[Received: October 9, 2012; accepted in final version: February 25, 2014]

**Abstract.** One of the efforts made by government to minimize the impact of flooding in the Citarum River Basin, particularly Bandung District, is through relocation. This study aims to identify factors influencing inhabitants' perceptions on the relocation plan in Cieunteung. The research methods include distributing questionnaire and conducting interviews with related stakeholders. The analysis shows that most of the people in Cieunteung rejected the relocation plan. Factors influencing this community rejection consist of information dissemination process, inter-stakeholders communication, community involvement in the planning process, level of education, social relations, and aspiration channelling to the government.

**Keywords.** Flood risk management, relocation, river basin, community perception

## Pendahuluan

Menurut Ramli (2010), banjir merupakan salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan sering dihubungkan dengan penggundulan hutan di kawasan hulu dari sistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Pengertian bencana banjir menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Banjir umumnya terjadi di dataran rendah di bagian hilir daerah aliran sungai, dimana daerah dataran rendah umumnya menjadi pusat permukiman

---

<sup>1</sup> Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB, fanniharliani@gmail.com

dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti pada Daerah Aliran Bengawan Solo, Dataran Sungai Citarum, dan Sungai Brantas (Ramli, 2010).

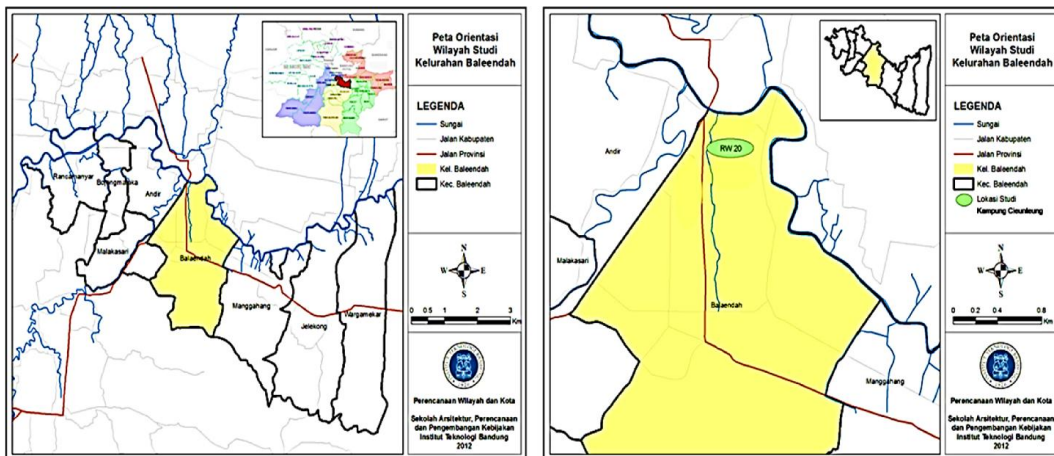
Bencana banjir di daerah aliran sungai (DAS) Citarum sering terjadi pada bagian DAS Citarum Hulu yang merupakan daerah cekungan Bandung (BBWS, 2011). Bencana banjir di daerah cekungan Bandung dikarenakan kepadatan penduduk yang semakin meningkat, khususnya di daerah bantaran Sungai Citarum, disertai dengan perubahan tutupan lahan di hulu Sungai Citarum yang mengganggu fungsi Sungai Citarum (BBWS, 2011). Menurut Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bandung (2010), pertumbuhan penduduk di cekungan Bandung yang tidak terkendali (sekitar 3% per tahun) sebagai pengaruh migrasi menyebabkan terjadinya peningkatan eksploitasi ruang dan pemanfaatan sumber daya air. Bentuk eksploitasi sumber daya air yaitu adanya pengambilan air tanah yang tidak terkendali (untuk kegiatan rumah tangga dan kegiatan industri) sehingga menyebabkan turunnya permukaan tanah dan memperbesar potensi daerah rawan banjir. Selain itu, beberapa penyebab lainnya yang dapat memperbesar potensi daerah rawan banjir di Kawasan Cekungan Bandung yaitu perilaku masyarakat yang menjadikan Sungai Citarum sebagai tempat pembuangan dan saluran drainase perkotaan yang kurang dikelola dengan baik.

Kampung Cieunteung, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung merupakan salah satu desa yang dilewati oleh aliran Sungai Citarum dan merupakan daerah yang selalu mengalami bencana banjir jika musim hujan tiba. Bencana banjir terjadi di kampung ini sejak puluhan tahun yang lalu dan hingga saat ini dampaknya dirasakan semakin parah. Hal ini dikarenakan kondisi Sungai Citarum yang semakin memburuk seperti sedimentasi yang semakin parah akibat perubahan guna lahan di daerah hulu dan pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Bencana banjir terparah terjadi di desa ini pada tahun 2010 dengan ketinggian air maksimal mencapai 4 m dan lama genangan mencapai 11 bulan (Hasil Wawancara Ketua RW 20, Desa Cieunteung, 2012). Bencana banjir yang terjadi menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat seperti kondisi fisik rumah dan lingkungan yang semakin menurun, kesulitan mobilitas untuk bekerja dan sekolah, serta terserang oleh berbagai macam penyakit. Hingga saat ini telah banyak penduduk yang pindah dari kampung ini karena banjir. Dari 283 KK yang tinggal, sekitar 50 KK tidak dapat menempati kembali tempat tinggalnya karena kerusakan yang cukup parah dan akhirnya memutuskan untuk mengontrak di tempat lain.

Upaya penanganan permasalahan di DAS Citarum dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural (BBWS, 2011). Dalam kasus penanganan permasalahan banjir di Kampung Cieunteung telah dilakukan berbagai metode struktural seperti pengerukan sungai dalam rangka normalisasi sungai, pembuatan tanggul penahan banjir, pembuatan pintu-pintu air di anak Sungai Citarum yaitu Sungai Cigado, dan pembuatan kolam retensi yang masih dalam tahap perencanaan. Pembuatan kolam retensi atau danau buatan di Kampung Cieunteung diusulkan oleh pihak BBWS serta dirundingkan bersama-sama oleh beberapa pihak seperti Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Usulan rencana pembuatan kolam retensi hingga saat ini masih dalam tahap perundingan penandatanganan kerjasama atau MoU. Rencana ini belum menemukan solusi yang tepat karena terkendala oleh masalah pembebasan lahan untuk lokasi kolam retensi tersebut. Kendala yang dihadapi terutama dalam hal persetujuan masyarakat Cieunteung serta kesepakatan diantara pemerintah terhadap rencana relokasi.

Keberhasilan atau kegagalan program relokasi dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan (Ozden, 2006). Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan relokasi permukiman pasca-bencana akan

menimbulkan berbagai persoalan seperti keterlambatan waktu pelaksanaan serta dampak negatif lainnya setelah relokasi dilaksanakan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, peluang timbulnya berbagai kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat akan semakin besar karena tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat (Dikmen, 2006). Berdasarkan hal tersebut, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Cieunteung terkait rencana relokasi menjadi penting untuk diteliti untuk mendukung serta memberikan input terhadap proses perencanaan relokasi permukiman akibat bencana banjir.



**Gambar 1.** Peta Orientasi Wilayah Studi

*Sumber: Hasil Analisis, 2012*

## Tinjauan Literatur

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tinjauan teori yang mendukung penelitian ini, yaitu konsep pengelolaan bencana banjir, relokasi permukiman pasca-bencana, serta proses pembentukan persepsi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### *Konsep Pengelolaan Bencana Banjir*

Untuk menanggulangi bencana diperlukan suatu konsep yang disebut sebagai pengelolaan bencana, yaitu tindakan kolektif yang mencakup seluruh aspek dalam perencanaan dan dalam merespon bencana baik ketika pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana (Carter, 1991). Menurut UU No. 24 Tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Terdapat empat fase utama dalam sistem pengelolaan bencana yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan dan pembangunan yang dilihat secara siklus dan aktivitas yang saling berkaitan satu sama lain. Selain itu ada pula siklus manajemen bencana yang terdiri atas mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, pembangunan, dan pencegahan yang seluruhnya menjadi suatu siklus yang tertutup (Carter, 1991).

Untuk menanggulangi bencana banjir terdapat suatu metode yang disebut sebagai pengelolaan banjir terpadu. Pengelolaan banjir terpadu merupakan proses keterpaduan pengelolaan banjir melalui pendekatan pengelolaan tanah dan sumber daya air, daerah pantai pesisir, dan

pengelolaan daerah bencana pada suatu DAS dengan tujuan memaksimalkan keuntungan daerah bantaran banjir dan meminimumkan kehilangan nyawa dan kerusakan harta benda dari banjir (Green dkk, 2004 dalam Kodoatie dan Sjarief, 2010). Pengelolaan banjir terpadu juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan banjir dan pengelolaan aspek lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial khususnya dalam kenyamanan dan keamanan terhadap kejadian bencana banjir dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting (Kodoatie dan Sjarief, 2010). Dalam konteks pengelolaan banjir terpadu pada daerah aliran sungai tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu sistem dari hulu hingga ke hilir sungai. Selain itu dalam praktek pengelolaan banjir harus memperhatikan berbagai lingkup keilmuan secara menyeluruh seperti pengairan, kehutanan dan juga perlu untuk memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan provinsi. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan banjir terpadu juga menjadi aspek penting lain yang perlu diperhatikan.

Untuk pengelolaan banjir terbagi ke dalam dua metode pengendalian banjir yaitu metode struktur dan metode non-struktur. Dahulu, penerapan metode struktur dalam pengendalian banjir lebih diutamakan dibandingkan metode non-struktur. Metode struktur ini dilakukan dengan pembuatan waduk-waduk atau bendungan pengendali banjir, pembangunan tanggul-tanggul di pinggir sungai pada daerah rawan banjir, pembangunan kanal-kanal, pembangunan interkoneksi antar sungai, pembangunan polder, dan pelurusan sungai (Yulaelawati dan Syihab, 2008). Akan tetapi, saat ini banyak negara maju mengubah pola pengendalian dengan mengutamakan metode non-struktur terlebih dahulu. Metode non-struktur berkaitan dengan perubahan guna lahan di daerah hulu sungai dimana sangat mempengaruhi debit puncak suatu sungai hingga ke hilirnya. Selain itu, metode non-struktur ini juga dapat dilakukan dengan pengelolaan dataran banjir dengan penataan ruang dan rekayasa dataran banjir, penerapan sistem prakiraan dan peringatan dini banjir, serta pengamanan terhadap banjir yang dilaksanakan sendiri baik oleh perorangan, swasta, atau kelompok masyarakat, dan lain-lain (Yulaelawati dan Syihab, 2008). Sementara untuk daerah banjir dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, ada kalanya metode struktur ataupun non-struktur sulit dilakukan karena terkait dengan masalah pembebasan lahan seperti pembuatan kolam retensi, pelebaran sungai, perubahan guna lahan hulu sungai, dan lain-lain.

### *Relokasi Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Banjir*

Di dalam siklus manajemen bencana terdapat empat fase yang harus dilakukan secara berkesinambungan satu sama lain diantaranya fase mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan dan pembangunan kembali. Fase pemulihan dan pembangunan kembali (*recovery and reconstruction*), merupakan fase di dalam tahapan manajemen bencana yang memiliki kesempatan lebih besar dan signifikan dalam mengurangi resiko bencana serta meningkatkan adaptasi terhadap bencana (Usamah dan Haynes, 2011). Salah satu langkah yang sering dilakukan dalam tahap rekonstruksi yaitu relokasi atau permukiman kembali pasca-bencana, dimana permukiman yang mengalami kerusakan akibat bencana dibangun kembali di tempat yang sama atau di tempat lain agar terhindar dari resiko bencana. Relokasi yang terjadi karena lokasi lama merupakan daerah bencana alam disebut pula sebagai relokasi korban bencana dan relokasi tersebut dapat dilakukan secara temporer maupun permanen. Relokasi penduduk juga merupakan salah satu kebijakan yang biasa dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam, bahkan menjadi solusi yang populer dalam

pengelolaan bencana (Whiteford dan Tobin, 2004). Relokasi pada bencana banjir sendiri harus dilakukan pada daerah rawan banjir dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Definisi dari relokasi permukiman yaitu perpindahan ke lokasi lain karena penyediaan lahan atau rumah secara terpaksa ataupun tidak terpaksa (Tercan, 2001 dalam Dikmen, 2006). Relokasi sering dilakukan sebagai tindakan untuk menghadapi fase *recovery* atau rekonstruksi. Akan tetapi relokasi permukiman sementara dalam fase *recovery* hanya akan menunda dan memperpanjang fase pemulihan (Quarantelli, 1999b). Untuk itu, relokasi permukiman permanen lebih baik dibandingkan sementara jika bencana terus menerus terjadi. Dalam beberapa kasus meskipun relokasi dapat mengurangi resiko terhadap bahaya, tetapi juga dapat meningkatkan kerentanan (*vulnerability*) terutama dalam aspek mata pencaharian, sosial, budaya, dan politik (Usamah dan Haynes, 2011). Dampak kepada aspek mata pencaharian yang terjadi pada program relokasi pasca bencana Gunung berapi Mayon di Filipina yaitu program relokasi permukiman seringkali berhasil mengurangi resiko terhadap bencana tetapi tidak mementingkan keberlanjutan mata pencaharian para korban bencana. Hal ini semakin diperparah dengan ketersediaan lapangan pekerjaan baru yang kurang di tempat tinggal baru dan kemampuan serta keahlian masyarakat yang rendah.

Selain dampak ekonomi, dampak sosial budaya juga terjadi akibat program relokasi diantaranya mengenai keamanan terhadap kepemilikan aset dan bangunan (*tenure security*), masalah privasi dan akses terhadap kebutuhan dasar, meningkatnya nilai mata uang dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, kehilangan ikatan sosial dengan masyarakat, dan kesetaraan gender. Relokasi bukan saja didefinisikan sebagai perpindahan individual seseorang tetapi meliputi keluarga, desa, dan masyarakatnya sehingga pemerintah perlu juga memindahkan seluruh aspek kehidupannya. Yang harus dipindahkan bukan saja tempat tinggal masyarakat tetapi juga tempat bekerja, tempat bermain, tempat beribadah, dan tempat-tempat lainnya yang berintegrasi dalam kehidupan sosial penduduk (Quarantelli, 1999a). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam semua tahapan program relokasi menjadi tantangan yang harus dapat dicapai karena kegagalan program relokasi salah satunya dikarenakan lemahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses relokasi permukiman akibat bencana, adalah sebagai berikut (Usamah & Haynes, 2011; Dikmen, 2006; Ozden, 2006) :

1. Aspek sosial dan budaya, yang meliputi hubungan sosial dengan tetangga, kerabat, ketersediaan tempat berkumpul dan fasilitas lain yang mendukung seperti di lingkungan tempat tinggal yang lama, serta jaminan terhadap status kepemilikan lahan dan bangunan.
2. Aspek ekonomi, meliputi jarak antara lokasi lingkungan yang baru dengan tempat bekerja, jaminan terhadap mata pencaharian, serta penggantian aset lahan dan bangunan.
3. Aspek fisik dan lingkungan, yang mempengaruhi diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan maupun kondisi geografis di lingkungan baru.
4. Aspek kualitas konstruksi bangunan, seperti bahan bangunan yang digunakan untuk membangun tempat tinggal yang baru, sistem instalansi di dalam bangunan rumah, pemilihan lokasi tempat tinggal baru, pemilihan tapak (*site selection*), dan perencanaan desain permukiman baru.
5. Aspek proses pengambilan keputusan, yang melibatkan partisipasi masyarakat serta *stakeholder* lain yang berkepentingan serta proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang baik.

### *Proses Pembentukan Persepsi Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*

Persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, menafsirkan, menerjemahkan, dan merespon informasi yang berasal dari lingkungan sekitarnya (Schermerhorn, 2010). Setiap orang akan memberikan persepsi yang berbeda terhadap satu situasi yang sama karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Sechermerhon mendeskripsikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan persepsi berasal dari tiga karakteristik elemen persepsi sebagai berikut:

1. Pihak yang memberikan persepsi (*The Perceiver*), proses persepsi dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu orang yang memberikan persepsi, kebutuhan dan motivasinya, kepribadiannya, nilai dan perilaku yang dimilikinya
2. Konteks situasi atau karakteristik dari keadaan yang sedang terjadi (*Characteristics of the setting*), yang terdiri dari konteks fisik, konteks sosial, dan konteks organisasional.
3. Karakteristik dari sesuatu yang sedang dipersepsikan (*The Perceived*) baik itu orang, benda, acara, atau kegiatan dalam kondisi tingkat kekontrasan, intensitas, ukuran, pergerakan, pengulangan atau pembaharuan, dan lain-lain.

Proses pembentukan persepsi secara keseluruhan terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian proses pembentukan persepsi, dan akhirnya terbentuklah suatu respon yang disebut sebagai persepsi. Tahapan dari proses pembentukan persepsi yaitu diantaranya proses pemilihan dan perhatian terhadap informasi, organisasi informasi, interpretasi informasi, dan yang terakhir pengambilan informasi. Dalam proses pembentukan persepsi ini, pemberian informasi mengenai objek yang dipersepsikan menjadi unsur penting karena akan sangat berpengaruh terhadap proses organisasi dan interpretasi orang yang memberikan persepsi. Diperlukan penyamarataan pemberian informasi mengenai objek yang akan dipersepsikan agar tidak terjadi distorsi informasi sehingga adanya penyimpangan dalam memberikan persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sendiri yaitu terdiri dari tiga elemen, yaitu konteks situasi, karakteristik dari objek persepsi, dan karakteristik orang yang melakukan persepsi (Schermerhorn, 2010), sehingga pada akhirnya terbentuklah suatu persepsi yang akan menghasilkan respon berupa perasaan, pemikiran, dan tindakan seseorang terhadap suatu informasi.

Rencana pemerintah untuk merelokasi permukiman penduduk di pinggir Sungai Citarum akan membentuk suatu persepsi bagi masyarakat yang menjadi objek dalam rencana ini. Dihubungkan dengan tiga elemen yang mempengaruhi persepsi, dalam rencana relokasi ini perlu diketahui mengenai tiga hal yaitu:

1. Kondisi dari masyarakat sebagai orang yang memberikan persepsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya kebutuhan masyarakat saat ini, motivasi atau tujuan yang diinginkan masyarakat, dan nilai sosial serta perilaku yang dimiliki oleh masyarakat. Rencana relokasi yang dilakukan pemerintah seharusnya dapat sesuai dengan persepsi masyarakat khususnya faktor internal setiap individu yaitu menjawab kebutuhan masyarakat itu sendiri.
2. Konteks situasi yang dipengaruhi oleh konteks fisik, konteks sosial, dan konteks organisasional. Konteks fisik yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam rencana relokasi berkaitan dengan kondisi fisik dan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Aspek fisik yang mempengaruhi terjadinya relokasi adalah terjadinya degradasi lingkungan di sekitar aliran sungai dan juga menurunnya tingkat kenyamanan permukiman. Kondisi tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap rencana relokasi. Kondisi sosial yang terjalin di dalam masyarakat juga menjadi faktor yang

mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap rencana relokasi. Selain itu, kondisi organisasional baik yang terdapat di dalam masyarakat maupun pemerintah akan mempengaruhi keadaan masyarakat dalam menentukan persepsinya terhadap rencana relokasi.

3. Karakteristik dari objek yang dipersepsikan, dalam hal ini objek yang sedang dipersepsikan adalah rencana relokasi permukiman penduduk yang menjadi rencana pemerintah dalam rangka menanggulangi bencana banjir di sekitar Sungai Citarum. Dalam hal ini memfokuskan kepada apa latar belakang timbulnya rencana relokasi dan bagaimana prosedur yang terdapat dalam rencana tersebut. Deskripsi dari rencana relokasi ini akan sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap rencana tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejasas mungkin tanpa ada perlakuan (*treatment*) terhadap objek yang diteliti (Kountur, 2007). Penelitian ini memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap rencana relokasi yang dilakukan oleh pemerintah. Peneliti tidak mencoba untuk memanipulasi data dan informasi yang didapatkan dari masyarakat, tetapi mencoba untuk mengungkapkan sejasas-jelasnya kondisi yang terjadi di dalam masyarakat.

#### *Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu metode pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, rencana relokasi, serta karakteristik masyarakat Kampung Cieunteung yang tinggal di pinggir Sungai Citarum. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penting dari sumber-sumber ilmiah terkait, surat kabar/media massa lainnya, serta dari dokumen pemerintahan.

Metode observasi dilakukan untuk melihat perilaku suatu objek tertentu dan kemudian digunakan pula untuk mengecek antara realitas dan jawaban informan. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat kondisi fisik dan lingkungan permukiman yang berada di pinggir Sungai Citarum serta memahami karakteristik penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Observasi lapangan Kampung Cieunteung dilakukan ketika rona awal pada tanggal 20 Februari 2012, serta saat pelaksanaan survei lapangan yang dilakukan pada tanggal 30 – 31 Maret 2012. Wawancara yang dilakukan kepada instansi pemerintahan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang program relokasi dan pembebasan lahan yang akan dilakukan di Kampung Cieunteung, tahap-tahap perencanaannya, pihak-pihak yang terlibat, serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 hingga 27 Februari 2012.

Wawancara yang dilakukan kepada instansi pemerintahan dilakukan untuk mengetahui kejelasan program relokasi dan pembebasan lahan yang akan dilakukan di Kampung Cieunteung, sampai tahap mana perencanaannya, pihak mana saja yang terlibat, serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Instansi pemerintah yang diwawancarai adalah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Bappeda Kabupaten Bandung, dan Dinas Sumber Daya Pengairan Kabupaten Bandung. Wawancara juga dilakukan pada tokoh masyarakat, dalam hal ini adalah Kepala Kelurahan Baleendah dan Ketua RW 20 yang bertujuan untuk mencari informasi mengenai kondisi wilayah studi Kampung Cieunteung

dan bencana banjir yang sering terjadi di wilayah ini serta mencari informasi terkait rencana relokasi atau pun pembebasan lahan yang telah diketahui oleh masyarakat dan bagaimana masyarakat menanggapi. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 2012 hingga 27 Februari 2012.

Kuesioner dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai persepsi masyarakat Kampung Cieunteung terhadap rencana relokasi. Kuesioner ditujukan kepada penduduk asli, yaitu mereka yang tercatat secara administratif bertempat tinggal tetap di RW 20, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Secara lebih khusus responden terdiri dari pemilik bangunan tempat tinggal di wilayah ini. Dari 199 pemilik bangunan yang tercatat, diambil sampel dengan menggunakan teknik *systematic random sampling*. Sampel probabilitas digunakan sebagai metode pendekatan untuk survei yang bertujuan mengeneralisasi suara dari masyarakat. Untuk itu perlu adanya prinsip keacakan (*randomness*), yaitu setiap sampel memiliki peluang yang sama untuk dipilih (Eriyanto, 2007). Untuk penentuan jumlah sampel, menggunakan rumus penentuan jumlah sampel sederhana dalam populasi kecil yang diketahui. (Rea dan Parker, dalam Eriyanto 2007).

Data jumlah pemilik bangunan tempat tinggal di RW 20 sejumlah 199 KK. Ditetapkan bahwa tingkat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat *error* sebesar 10%. Variasi populasi ditetapkan sebesar 0,5 karena dengan asumsi keragaman populasi cukup heterogen yaitu terdiri dari strata sosial yang berbeda-beda. Dengan menggunakan rumus menghitung jumlah sampel diatas, maka jumlah sampel yang didapatkan yaitu sebesar 65.

### *Metode Analisis Data*

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode yaitu analisis statistik deskriptif, analisis statistik inferensi, dan analisis asosiasi.

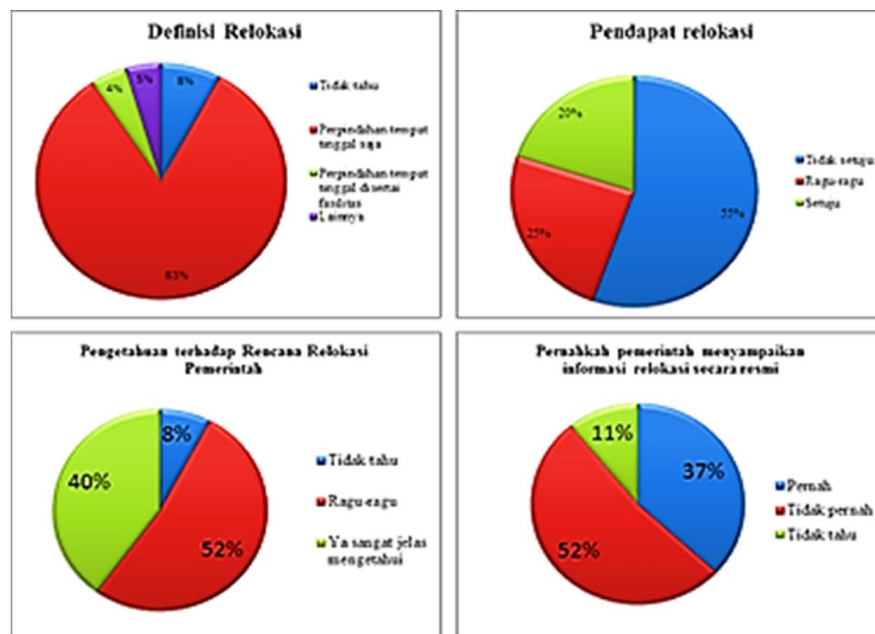
1. Analisis Statistik Deskriptif, merupakan metode analisis yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna (Walpole, 1990). Penyajian informasi dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, diagram dan besaran lainnya secara jelas dan ringkas melalui proses reduksi data. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif berguna untuk menjelaskan mengenai persepsi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat.
2. Analisis Statistik Inferensi, merupakan metode analisis yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya (Walpole, 1990). Analisis inferensi dilakukan karena terdapat beberapa pengambilan data primer yang menggunakan sampel dari populasi jumlah penduduk. Untuk itu diperlukan estimasi karakteristik populasi dengan menggunakan sampel tertentu yang ditunjukkan dalam sebuah derajat kepercayaan tertentu.
3. Analisis Asosiasi Korelatif berbasis Chi-Square dan Korelasi R-Pearson, merupakan metode analisis yang bertujuan untuk melihat adanya hubungan antara dua atau lebih karakteristik objek atau variabel (Sawitri, 2009). Analisis asosiasi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang paling berhubungan atau paling mempengaruhi persepsi masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang tidak terlalu mempengaruhi persepsi masyarakat. Dalam penelitian ini analisis asosiasi digunakan dalam melihat seberapa besar hubungan antara persepsi masyarakat tentang rencana relokasi dengan variabel dalam faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat.



## Analisis dan Interpretasi

### *Persepsi Masyarakat Mengenai Rencana Relokasi*

Persepsi masyarakat terdiri dari persepsi dan proses organisasi informasi yang menjadi proses pembentukan persepsi. Dalam hal ini, untuk menunjukkan persepsi masyarakat mengenai rencana relokasi diperlihatkan dalam dua bagian besar, yakni pengetahuan tentang rencana relokasi yang terdiri dari tiga variabel yaitu pemahaman terhadap definisi relokasi, pengetahuan terhadap rencana relokasi pemerintah, dan penyampaian informasi relokasi secara resmi oleh pemerintah serta bagian persepsi masyarakat terkait dengan rencana relokasi.



**Gambar 2.** Persepsi Masyarakat Kampung Cieunteung terhadap Rencana Relokasi Permukiman  
*Sumber: Hasil Analisis, 2012*

### Pengetahuan tentang Rencana Relokasi

Pengetahuan responden mengenai rencana relokasi ini merupakan representasi dari tahapan pembentukan persepsi responden yang terdiri dari pemilihan dan perhatian terhadap informasi, organisasi informasi, interpretasi informasi, dan pengambilan informasi (Schemerhorn, 2010). Tahapan pembentukan persepsi masyarakat mengenai relokasi tersebut kemudian berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap rencana relokasi dan pembebasan lahan akibat bencana banjir.

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa sebanyak 83,09% responden mengetahui definisi relokasi sebagai perpindahan tempat tinggal ke tempat lain saja. Responden hanya menilai relokasi sebagai perpindahan tempat tinggal ke tempat lain yang telah disediakan pemerintah tanpa dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dibutuhkan. Responden juga ada yang tidak mengetahui sama sekali mengenai definisi dari relokasi itu sendiri yaitu sebanyak 7,69%. Sisanya masing-masing sebanyak 4,62% mengetahui definisi relokasi sebagai

perpindahan tempat tinggal disertai dengan fasilitas umum dan sosial serta mengetahui relokasi sebagai definisi lainnya.

Definisi lainnya yang dimaksud oleh responden adalah mereka mengetahui relokasi sebagai adanya penawaran dari pemerintah dan pihak swasta untuk membeli tanah dan bangunan milik masyarakat dengan harga tertentu sesuai yang ditawarkan. Relokasi merupakan perpindahan ke lokasi lain karena penyediaan lahan atau rumah secara terpaksa ataupun tidak terpaksa (Tercan, 2001), sedangkan definisi lainnya yang dipahami oleh responden disebut sebagai pembebasan lahan.

Pembebasan lahan yang dalam hal ini disebut juga sebagai pengadaan tanah yang menurut Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah, merupakan setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Definisi mengenai pembebasan lahan atau pengadaan tanah tersebut berbeda dengan definisi relokasi, akan tetapi masih banyak masyarakat di Kampung Cieunteung yang memahami keduanya sebagai suatu hal yang sama. Pemahaman yang kurang tepat terhadap kedua definisi tersebut akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat untuk rencana relokasi itu sendiri.

Hasil analisis mengenai pengetahuan terhadap rencana relokasi dari pemerintah memperlihatkan bahwa sebanyak 52,31% responden menjawab ragu-ragu. Keragu-raguan tersebut dikarenakan responden mengetahui rencana relokasi hanya dari obrolan yang bersifat informal dengan tetangga di lingkungan tempat tinggal sehingga informasi yang diperoleh tidak begitu jelas. Sebanyak 40% responden mengetahui rencana relokasi dari pemerintah merasa mengetahui rencana relokasi dengan jelas. Responden yang menjawab demikian dikarenakan dapat menjelaskan rencana relokasi tersebut secara jelas hingga kondisinya saat ini. Sedangkan sisanya sebanyak 7,69% menjawab tidak mengetahui sama sekali mengenai rencana relokasi oleh pemerintah. Masyarakat yang merasa mengetahui secara jelas menerangkan bahwa rencana relokasi yang diajukan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut:

- Pemindahan tempat tinggal ke lingkungan baru yang terletak di daerah Banjaran (dekat dengan pegunungan);
- Luas lahan yang diberikan di tempat tinggal baru tersebut sekitar 2-3 tumbak (1 tumbak = 14 m<sup>2</sup>) dan setiap pemilik bangunan mendapatkan luas yang sama rata (tidak disesuaikan dengan luas lahan bangunan yang dimiliki saat ini);
- Status kepemilikan lahan dan bangunan di tempat tinggal yang baru tidak jelas, apakah masyarakat mendapatkan hak milik dan hak tinggal atau hanya hak tinggal saja.

Pengetahuan masyarakat mengenai rencana relokasi yang diajukan oleh pemerintah tidak terlepas dari bagaimana cara masyarakat Kampung Cieunteung mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Hasil analisis memperlihatkan bahwa sebanyak 52,31% responden menjawab pemerintah belum pernah menyampaikan secara resmi mengenai rencana relokasi permukiman atau pembebasan lahan sebagai akibat dari bencana banjir. Sebanyak 35,92% responden menjawab pemerintah pernah menyampaikan informasi tersebut secara resmi dan sebanyak 10,77% menjawab tidak tahu sama sekali. Responden yang mengatakan pernah ada informasi resmi mengenai rencana relokasi dari pemerintah mendapatkan informasi tersebut melalui rapat RW, sosialisasi melalui selebaran kertas dari kelurahan, melalui Bupati yang datang ke lokasi pengungsian pada tahun 2009, serta dari media TV dan koran. Akan tetapi masyarakat mengakui bahwa meskipun pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak

pemerintah, tidak mendapatkan keterangan secara jelas mengenai rencana relokasi yang sebenarnya hingga saat ini.

Dari hasil analisis ini, diketahui bahwa masyarakat belum mengetahui secara pasti bagaimana prosedur relokasi atau pembebasan lahan tersebut seperti dimana lokasi tempat tinggal yang baru, berapa harga lahan dan bangunan yang ditawarkan pemerintah, bagaimana status kepemilikan lahan dan bangunan di tempat yang baru, dan lain-lain. Dapat disimpulkan pula bahwa belum ada sosialisasi secara jelas dari pemerintah mengenai rencana relokasi permukiman atau pembebasan lahan terkait bencana banjir. Selain itu penyebaran informasi mengenai rencana relokasi saat ini masih belum merata ke seluruh masyarakat di Kampung Cieunteung.

#### Persepsi Terhadap Rencana Relokasi

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa sebanyak 55,38% dari total responden tidak setuju dengan rencana relokasi permukiman sebagai alternatif solusi untuk penanggulangan banjir di Cieunteung. Selain itu sebanyak 24,62% dari total responden berpendapat ragu-ragu terhadap pernyataan yang menganggap relokasi permukiman sebagai upaya untuk penanggulangan banjir di Kampung Cieunteung. Sisanya sebanyak 20% dari total responden menyetujui bahwa relokasi permukiman merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan banjir di Kampung Cieunteung.

Sebagian besar masyarakat Kampung Cieunteung tidak menyetujui rencana relokasi permukiman. Terdapat berbagai alasan mengenai ketidaksetujuan tersebut diantaranya permasalahan banjir di Kampung Cieunteung disebabkan karena Sungai Citarum yang bermasalah, sehingga permukiman di Kampung Cieunteung bukan pangkal masalahnya, sudah nyaman dan lama tinggal di Kampung Cieunteung, serta ketidaksesuaian terhadap rencana relokasi yang ditawarkan pemerintah, mengikuti tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya, serta tidak percaya terhadap pemerintah.

Masyarakat yang menjawab setuju dengan rencana relokasi permukiman sebagai upaya penanggulangan banjir memiliki alasan utama karena sudah tidak tahan menghadapi bencana banjir yang sering terjadi di tempat tinggal saat ini. Masyarakat mengalami kerugian yang besar akibat bencana banjir baik secara materil maupun moril sehingga mereka setuju jika pindah ke tempat yang bebas dari ancaman banjir. Dengan adanya rencana relokasi permukiman, masyarakat memiliki harapan baru untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibandingkan di Kampung Cieunteung. Akan tetapi, responden yang setuju dengan rencana relokasi mengajukan berbagai syarat atau kriteria agar relokasi permukiman tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat yang menjawab ragu-ragu terhadap pendapat mengenai rencana relokasi sebagian besar beralasan belum dapat menentukan pilihan setuju atau tidak setuju karena rencana program relokasi yang masih belum jelas. Mereka masih menunggu kejelasan rencana relokasi terutama mengenai pertimbangan lokasi tempat tinggal yang baru, luas lahan dan bangunan, status kepemilikan lahan dan bangunan, serta syarat-syarat lainnya yang ditawarkan oleh pemerintah. Di sisi lain mereka masih memiliki keinginan untuk pindah ke tempat tinggal lain untuk menghindari bencana banjir.

Terdapat beberapa kriteria atau syarat yang diinginkan oleh masyarakat terhadap rencana relokasi permukiman yang akan dilakukan oleh pemerintah. Syarat-syarat yang diharapkan

dapat dipenuhi oleh pemerintah terdiri dari aspek lokasi tempat tinggal, lapangan pekerjaan, ketersediaan fasilitas umum dan sosial, serta aspek lainnya. Syarat-syarat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.** Kriteria Lokasi Permukiman Yang Baru Menurut Masyarakat Kampung Cieunteung Jika Dilaksanakan Relokasi Permukiman

Aspek	Syarat
Lokasi Tempat Tinggal	Tempat yang strategis yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekat dengan pusat kota</li> <li>• Dekat dengan tempat bekerja</li> <li>• Tidak di daerah pegunungan</li> <li>• Tidak terlalu jauh dari daerah Cieunteung</li> <li>• Masih di daerah Baleendah</li> <li>• Bebas dari ancaman banjir</li> </ul>
Lapangan Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pilihan lapangan pekerjaan yang beragam</li> <li>• Dekat dengan lapangan pekerjaan</li> <li>• Terdapat jaminan modal dan pekerjaan dari pemerintah</li> <li>• Dekat dengan keramaian seperti pasar agar peluang pekerjaan lebih banyak</li> </ul>
Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekat dengan sekolah, puskesmas/rumah sakit, pasar</li> <li>• Ketersediaan terhadap air bersih mudah</li> <li>• Kondisi jalan raya baik disertai transportasi umum yang memadai</li> </ul>
Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tetap dekat dengan tetangga yang sekarang</li> <li>• Penggantian lahan dan bangunan sesuai dengan yang dimiliki saat ini</li> <li>• Status kepemilikan lahan dan bangunan jelas</li> <li>• Ketersediaan bangunan untuk tempat tinggal yang siap huni</li> <li>• Lingkungan permukiman yang aman dan nyaman</li> </ul>

*Sumber: Hasil Analisis, 2012*

### *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mengenai Rencana Relokasi*

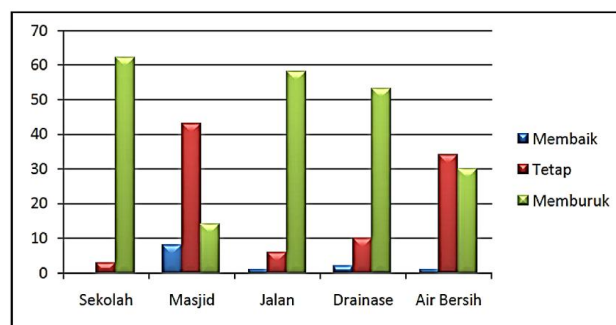
Proses pembentukan persepsi selain terdiri dari tahapan pembentukan proses persepsi juga didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi (Schemerhorn, 2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kampung Cieunteung terhadap rencana relokasi permukiman akibat bencana banjir terdiri dari beberapa aspek diantaranya persepsi masyarakat terhadap kondisi fisik dan lingkungan Kampung Cieunteung, kondisi sosial dan budaya, kondisi ekonomi, serta kondisi organisasional.

#### Kondisi Fisik dan Lingkungan

Persepsi masyarakat terhadap kondisi fisik dan lingkungan meliputi persepsi terhadap kondisi sarana dan prasarana lingkungan dan persepsi terhadap dampak bencana banjir di Kampung Cieunteung. Untuk kondisi sarana dan prasarana lingkungan, masyarakat menilai kondisi sekolah, masjid, jalan, drainase, dan air bersih berdasarkan kualitasnya. Penilaian masyarakat terhadap sarana dan prasarana tersebut berdasarkan dua kondisi yaitu ketika pertama kali pindah atau tinggal di Kampung Cieunteung dan ketika setelah bencana banjir terjadi. Dalam penilaian ini dilihat pula frekuensi penilaian responden yaitu bersifat *negative ranks*, *positive ranks*, atau *ties*. *Negative ranks* berarti penilaian sarana dan prasarana sesudah banjir lebih kecil dibandingkan sebelum atau ketika pertama kali pindah. *Positive ranks* berarti sebaliknya yaitu penilaian sarana dan prasarana sesudah banjir lebih besar dibandingkan sebelum atau ketika

pertama kali pindah, sedangkan *ties* berarti penilaian sebelum dan sesudah sama saja atau tidak ada perubahan.

Penilaian masyarakat terhadap fasilitas sekolah khususnya Sekolah Dasar, sebagian besar menilai *negative ranks* atau dengan kata lain semakin memburuk. Hal ini dikarenakan kondisi SD saat ini sudah tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga murid dan guru pindah tempat ke SD lain diluar lingkungan Kampung Cieunteung. Untuk penilaian kondisi masjid, sebagian besar masyarakat menilai tetap tidak ada perubahan (*ties*). Hal ini dikarenakan pengelolaan terhadap masjid cukup baik yaitu bangunan masjid sering mengalami renovasi sehingga jika setelah banjir mengalami rusak, maka dapat diperbaiki kembali. Penilaian masyarakat terhadap kondisi jalan lebih banyak yang bersifat *negative ranks* atau kondisi jalan dinilai semakin memburuk. Hal ini karena dengan intensitas banjir yang semakin sering terjadi membuat kualitas jalan semakin memburuk. Meskipun perbaikan jalan dilakukan, tetapi intensitas banjir yang lebih sering terjadi membuat kualitas jalan tetap memburuk. Begitu pula halnya dengan kondisi drainase yang semakin memburuk. Saat ini kondisi drainase tidak dapat menampung aliran air karena aliran tersumbat oleh sampah dan semakin dangkal karena adanya lumpur dari banjir. Kondisi drainase yang semakin memburuk ini menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Masyarakat sendiri sebenarnya sering mengadakan kerja bakti untuk membersihkan saluran drainase. Akan tetapi karena banjir yang terus menerus terjadi, membuat masyarakat bosan dan jenuh untuk membersihkan saluran drainase sehingga kondisi saat ini dibiarkan begitu saja. Untuk kondisi kualitas air bersih sendiri banyak yang menilai tetap dan memburuk.



**Gambar 3.** Penilaian terhadap Sarana dan Prasarana Lingkungan  
*Sumber: Hasil Analisis, 2012*

Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat di Kampung Cieunteung akibat banjir bermacam-macam. Jika diurutkan sesuai dengan yang paling dirasakan merugikan yaitu yang pertama kerugian pada kondisi fisik bangunan tempat tinggal serta barang-barang pribadi mengingat banyak perabotan rumah yang tidak bisa dipakai serta bangunan yang runtuh akibat banjir. Urutan yang kedua dari kerugian yang dirasakan akibat bencana banjir yaitu terhambatnya melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, dan lain-lain. Kerugian ini terutama dirasakan saat terjadi banjir dimana anak-anak tidak dapat bersekolah dengan baik, sedangkan orang tua tidak dapat bekerja sehingga penghasilan untuk keluarga berkurang. Urutan yang ketiga dari kerugian yang dirasakan akibat bencana banjir adalah timbulnya berbagai macam penyakit yang menyerang anak-anak maupun orang dewasa.

Dari berbagai macam kerugian atau dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat akibat bencana banjir mengalami perubahan dari saat pertama kali mengalami banjir hingga saat ini.

Persepsi terhadap perubahan dampak banjir yang dirasakan tersebut dapat semakin merugikan, tetap, atau semakin berkurang. Berdasarkan hasil analisis, sebanyak 78,46% dari total responden merasakan perubahan dari dampak bencana banjir yang semakin merugikan. Sebanyak 15,38% dari total responden merasakan tetap tidak ada perubahan dari dampak banjir dan sebanyak 6,15% dari total responden merasakan dampak bencana banjir yang semakin berkurang. Sebagian besar masyarakat merasa dampak bencana banjir yang semakin merugikan karena banjir yang terjadi semakin sering atau intensitas semakin tinggi. Dengan banjir yang semakin sering maka kerugian yang dialami masyarakat pun semakin meningkat.

Dengan adanya bencana banjir yang terus menerus terjadi di Kampung Cieunteung, membuat masyarakat memiliki inisiatif untuk menanggulangi banjir secara pribadi atau kelompok. Berdasarkan hasil analisis, sebanyak 76,92% dari total responden pernah melakukan usaha untuk mengantisipasi ataupun menanggulangi banjir. Usaha tersebut diantaranya seperti meninggikan lantai rumah, mengurug rumah, membersihkan selokan, membuat pintu-pintu air, membersihkan lumpur, dan membuat tanggul.

#### Kondisi Sosial dan Budaya

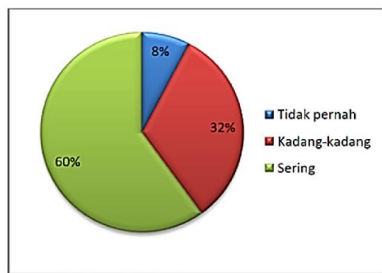
Persepsi masyarakat terhadap kondisi sosial dan budaya di Kampung Cieunteung dapat dilihat dari dua variabel yaitu persepsi masyarakat terhadap kesehatan dan persepsi masyarakat terhadap hubungan sosial yang terjalin di kampung ini.

Variabel kesehatan dipengaruhi dari seberapa sering masyarakat terkena penyakit akibat bencana banjir. Sebanyak 60% responden berpendapat sering terkena penyakit akibat banjir, kemudian sebanyak 32,31% responden menyatakan kadang-kadang dan sebanyak 7,69% responden menyatakan tidak pernah terkena penyakit akibat banjir. Jenis penyakit yang sering menjangkit masyarakat Kampung Cieunteung karena banjir diantaranya penyakit kulit seperti gatal-gatal, kutu air, penyakit ISPA seperti sesak nafas, paru-paru basah, penyakit demam, batuk, pilek, reumatik, dan diare. Untuk anak-anak sering terjangkit penyakit demam, batuk, dan diare akibat banjir

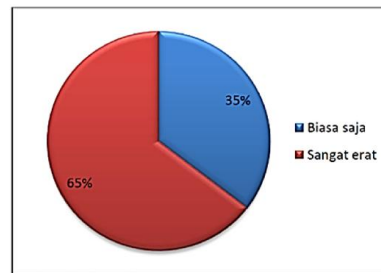
Kondisi sosial di lingkungan Kampung Cieunteung dapat dilihat dari persepsi masyarakatnya terhadap hubungan sosial yang terjalin diantara tetangga. Berdasarkan hasil analisis sebanyak 64,62% dari responden menilai bahwa hubungan sosial yang terjalin sangat erat, sedangkan sisanya sebanyak 35,38% responden menilai hubungan sosial yang terjalin biasa saja. Responden yang menilai hubungan sosial di Kampung Cieunteung sangat erat memiliki alasan bahwa lingkungan tetangga memiliki rasa saling pengertian dan tolong menolong yang tinggi. Hal ini juga dikarenakan sebagian besar tetangga masih memiliki hubungan keluarga. Responden yang menilai hubungan sosial di lingkungan Kampung Cieunteung biasa saja, memiliki alasan bahwa setelah terjadi bencana banjir banyak dari penduduk di kampung ini yang pindah. Hal ini membuat hubungan sosial saat ini menjadi semakin berkurang.

#### Kondisi Ekonomi

Persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Kampung Cieunteung akibat relokasi permukiman dapat dilihat dari tiga variabel yaitu variabel kekhawatiran responden terhadap aset lahan dan bangunan, serta mata pencaharian dan hubungan sosial jika terjadi relokasi permukiman.



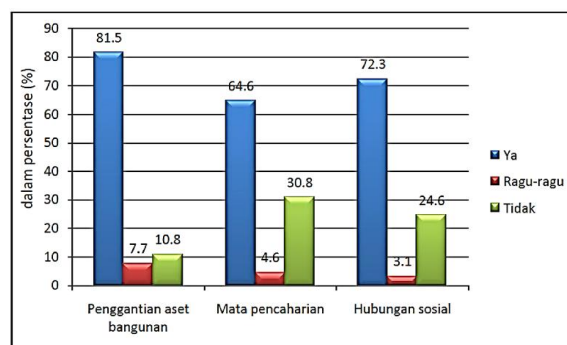
**Gambar 4.** Persepsi Terhadap Penyakit Akibat Bencana Banjir  
*Sumber: Hasil Analisis, 2012*



**Gambar 5.** Persepsi Terhadap Hubungan Sosial Masyarakat  
*Sumber: Hasil Analisis, 2012*

Hasil analisis menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap penggantian aset lahan dan bangunan jika terjadi relokasi permukiman atau pembebasan lahan menjadi hal paling utama yaitu sebesar 81,5%. Terhadap relokasi permukiman, masyarakat khawatir jika lahan dan bangunan di tempat tinggal yang baru tidak sesuai dengan lahan dan bangunan di tempat tinggal saat ini. Kekhawatiran tersebut meliputi luas lahan dan bangunan, serta kondisi fisik bangunan. Selanjutnya diikuti dengan kekhawatiran terhadap hubungan sosial yang sudah terjalin di lingkungan saat ini dan mungkin tidak akan didapatkan kembali di lingkungan permukiman yang baru, yaitu sebesar 72,3%.

Terakhir kekhawatiran terhadap mata pencaharian atau lapangan pekerjaan yang diperoleh di lingkungan yang baru sebesar 64,6%. Untuk masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh pabrik atau pegawai swasta kekhawatiran berupa semakin menjauhnya tempat tinggal dengan tempat bekerja sehingga memperbesar biaya ongkos bekerja. Untuk masyarakat yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta atau pedagang kekhawatiran berupa kehilangan konsumen langganan atau semakin membesarnya biaya produksi dan distribusi terhadap barang. Hasil analisis ini dapat menunjukkan urutan faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap relokasi permukiman atau pembebasan lahan yaitu kekhawatiran masyarakat terhadap penggantian aset lahan dan bangunan, kekhawatiran terhadap mata pencaharian di lingkungan baru, dan kekhawatiran terhadap hubungan sosial yang terjalin di lingkungan baru.



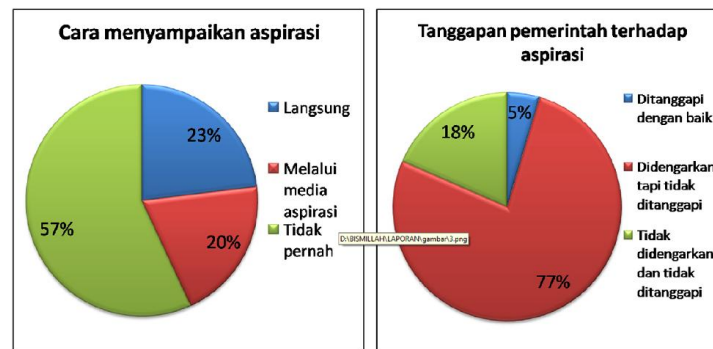
**Gambar 6.** Kekhawatiran Terhadap Aset, Pekerjaan, dan Hubungan Sosial  
*Sumber: Hasil Analisis, 2012*

### Kondisi Organisasi

Bencana banjir yang sering terjadi di Kampung Cieunteung merupakan bencana yang perlu diantisipasi atau ditanggulangi baik oleh masyarakat maupun pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab. Terdapat dua variabel yang dinilai yaitu variabel cara menyampaikan aspirasi yang sering masyarakat lakukan dan variabel tanggapan pemerintah terhadap aspirasi yang diberikan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, sebanyak 66,92% dari total responden merasa belum pernah menyampaikan aspirasi mengenai banjir kepada pemerintah, sedangkan sisanya merasa pernah menyampaikan aspirasi mengenai banjir baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebanyak 23,08% responden menyampaikan aspirasi secara langsung dan sisanya sebanyak 20% responden menyampaikan aspirasi melalui berbagai media. Cara penyampaian aspirasi secara langsung dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan melakukan demonstrasi di Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung dan Gedung Sate. Masyarakat menuntut pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan banjir melalui normalisasi Sungai Citarum. Selain melalui cara langsung, masyarakat juga menyampaikan aspirasi melalui media seperti adanya rapat-rapat yang diadakan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Variabel yang kedua untuk menunjukkan persepsi masyarakat terhadap pemerintah yaitu dengan menanyakan bagaimana tanggapan pemerintah yang diketahui oleh masyarakat terkait aspirasi mengenai bencana banjir. Berdasarkan hasil analisis, 76,92% dari responden menjawab pemerintah mendengarkan dan menerima aspirasi dari mereka tetapi tidak ditanggapi. Sebanyak 18,46% dari responden menjawab pemerintah tidak mendengarkan ataupun tidak menanggapi aspirasi yang diberikan oleh mereka. Berdasarkan hal ini, terlihat bahwa masyarakat Kampung Cieunteung sebagian besar menganggap pemerintah tidak pernah menanggapi berbagai aspirasi yang diberikan oleh mereka terkait bencana banjir.



**Gambar 7.** Persepsi terhadap Hubungan dengan Pemerintah  
*Sumber: Hasil Analisis, 2012*

### *Hubungan Antar Variabel*

Pada bagian ini akan dijelaskan hubungan antar variabel konsep pengelolaan bencana banjir, relokasi permukiman pasca-bencana, serta proses pembentukan persepsi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



### Hubungan Antara Persepsi Relokasi dengan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Berdasarkan hasil dari kedua analisis menggunakan Uji Chi-Square dan Uji Korelasi *R-Pearson* didapatkan hubungan antara persepsi relokasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.** Hasil Korelasi Antara Persetujuan Terhadap Rencana Relokasi dengan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Aspek	Variabel	Hasil Uji Chi-Square & Korelasi R-Pearson	
		Sig.	Nilai Korelasi
Fisik & Lingkungan	Kelayakan dan kenyamanan desa	0.003	0.363
Ekonomi	Kekhawatiran penggantian aset lahan dan bangunan	0.004	0.354
Karakteristik Internal	Karakteristik umur	0.014	0.350
Ekonomi	Kekhawatiran mata pencaharian	0.007	0.331
Sosial Budaya	Kekhawatiran hubungan sosial	0.012	0.308

*Sumber: Hasil Analisis, 2012*

Hubungan antara persepsi masyarakat mengenai rencana relokasi dengan aspek fisik dan lingkungan dijelaskan ke dalam variabel penilaian masyarakat terhadap kelayakan dan kenyamanan Kampung Cieunteung. Berdasarkan hasil analisis, responden yang menjawab desanya masih layak dan nyaman untuk ditinggali sebagian besar tidak setuju dengan rencana relokasi permukiman. Di sisi lain, responden yang menilai desanya tidak layak dan tidak nyaman berpendapat setuju terhadap rencana relokasi permukiman. Dengan demikian penilaian masyarakat terhadap kelayakan dan kenyamanan Kampung Cieunteung sebagai tempat tinggal mempengaruhi pendapat mereka terhadap persetujuan rencana relokasi. Besarnya nilai korelasi kedua variabel tersebut yaitu 0,363 yang termasuk ke dalam hubungan yang lemah.

Hubungan antara persepsi masyarakat Kampung Cieunteung mengenai relokasi dengan aspek ekonomi diperlihatkan dalam dua pasangan variabel yaitu kekhawatiran terhadap mata pencaharian dan kekhawatiran terhadap penggantian aset lahan dan bangunan. Terdapat hubungan antara pendapat masyarakat mengenai relokasi dengan kekhawatiran terhadap mata pencaharian mereka dengan nilai korelasi 0,331 yang termasuk ke dalam hubungan yang lemah. Responden yang menjawab tidak setuju dengan rencana relokasi sebagian besar memiliki kekhawatiran terhadap mata pencaharian mereka. Disisi lain, responden yang menjawab setuju dengan rencana relokasi, sebagian besar menjawab tidak memiliki kekhawatiran terhadap mata pencaharian mereka. Jaminan terhadap mata pencaharian di tempat tinggal yang baru menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persetujuan masyarakat terhadap rencana relokasi di Kampung Cieunteung. Hal ini sesuai dengan (Usamah dan Haynes, 2011), dimana salah satu dampak ekonomi dari adanya relokasi adalah terhadap aspek *livelihood security* di lingkungan tempat tinggal yang baru seperti jarak antara tempat tinggal yang baru dengan tempat bekerja.

Variabel dari aspek ekonomi yang memiliki hubungan dengan persetujuan terhadap rencana relokasi yaitu variabel kekhawatiran terhadap penggantian aset lahan dan bangunan dengan nilai korelasi 0,354 yang termasuk hubungan lemah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tampak bahwa responden yang menjawab tidak setuju dengan rencana relokasi memiliki kekhawatiran terhadap penggantian aset lahan dan bangunan. Kejelasan penggantian lahan dan bangunan dalam program relokasi permukiman menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persetujuan masyarakat Kampung Cieunteung terhadap rencana relokasi. Penggantian lahan dan bangunan

yang dimaksud meliputi kejelasan status kepemilikan lahan dan bangunan, kesesuaian luas lahan dan bangunan pengganti, serta desain dan bahan konstruksi fisik bangunan.

Pasangan variabel ketiga menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara persepsi masyarakat mengenai setuju atau tidak setuju terhadap relokasi dengan umur responden. Responden yang menjawab tidak setuju terhadap rencana relokasi permukiman sebagian besar berada pada rentang umur 25-44 tahun, sedangkan yang menjawab setuju berada pada rentang umur >45 tahun. Rencana relokasi permukiman sebagai upaya penanggulangan banjir sebagian besar disetujui oleh masyarakat dengan umur dewasa menjelang tua. Masyarakat yang masih berada di kelompok umur dewasa lebih banyak tidak menyetujui. Bencana banjir yang sering terjadi di Kampung Cieunteung membutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran yang cukup banyak agar tetap bertahan hidup, sedangkan masyarakat golongan tua sudah memiliki keterbatasan sehingga lebih berkeinginan untuk pindah ke tempat tinggal yang lebih nyaman dan tenang.

Variabel dari aspek sosial budaya yang memiliki hubungan dengan persepsi masyarakat terhadap rencana relokasi adalah variabel kekhawatiran terhadap hubungan sosial yang sudah terjalin yang mungkin tidak dapat ditemukan di lingkungan baru, dengan nilai korelasi 0,308 (hubungan lemah). Sebagian besar responden yang menjawab tidak setuju terhadap rencana relokasi memiliki kekhawatiran terhadap hubungan sosial di lingkungan baru. Masyarakat yang memiliki kedekatan hubungan sosial yang erat akan merasa sulit untuk pindah ke lingkungan tempat tinggal yang baru karena memerlukan proses adaptasi lebih lama. Menurut Ozden (2006), proses adaptasi yang lama di lingkungan tempat tinggal baru hanya akan menciptakan rasa tidak bahagia, putus asa, dan tidak puas bagi masyarakat korban bencana. Berlawanan dengan hal tersebut, responden yang menjawab setuju dengan rencana relokasi sebagian besar tidak memiliki kekhawatiran terhadap hubungan sosial yang terjalin di lingkungan baru.

#### Hubungan Antara Pengetahuan Relokasi dengan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Uji Chi-Square dan Korelasi *R-Pearson* didapatkan beberapa variabel yang memiliki hubungan dengan variabel pengetahuan masyarakat terhadap rencana relokasi. Berikut merupakan nilai korelasi dan signifikansi dari setiap pasangan variabel yang berhubungan tersebut.

**Tabel 2** Hasil Korelasi Antara Pengetahuan Masyarakat Tentang Rencana Relokasi dengan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

No	Variabel 1	Variabel 2	Sig.	Nilai Korelasi
1	Definisi Relokasi	Tingkat pendidikan	0.01	0.395
2	Pengetahuan terhadap rencana relokasi	Hubungan sosial yang terjalin	0.001	0.392
3	Cara mendapatkan informasi mengenai relokasi	Cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah	0.016	0.346

*Sumber: Hasil Analisis, 2012*

Pasangan variabel yang pertama menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengenai definisi relokasi yaitu sebesar 0,395 (hubungan lemah). Dari hasil analisis ini diketahui bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan masyarakat terhadap definisi relokasi. Responden yang tidak mengetahui sama sekali definisi relokasi memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu tidak tamat SD dan tamat SD, sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pengetahuan terhadap definisi dari relokasi yang lebih beragam.

Pasangan variabel yang kedua menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan masyarakat terhadap rencana relokasi dengan hubungan sosial yang dimiliki masyarakat. Sebagian besar responden yang memiliki kedekatan hubungan sosial yang biasa saja tidak mengetahui rencana relokasi dari pemerintah, sedangkan responden yang memiliki kedekatan hubungan sosial sangat erat dengan tetangganya sebagian menjawab mengetahui mengenai rencana relokasi dari pemerintah. Penyebaran informasi mengenai rencana relokasi dari pemerintah berhubungan dengan tingkat kedekatan sosial masyarakat di lingkungannya. Masyarakat Kampung Cieunteung yang mengetahui rencana relokasi permukiman dari pemerintah hanya kelompok masyarakat yang sering bersosialisasi di lingkungannya, sedangkan masyarakat yang jarang bersosialisasi tidak mengetahui rencana relokasi dari pemerintah. Dengan demikian terjadi distorsi informasi diantara masyarakat mengenai rencana relokasi permukiman dari pemerintah yang salah satunya dipengaruhi oleh aspek hubungan sosial.

Dampak yang terjadi akibat ketidakmerataan informasi ini adalah masyarakat yang sering menyampaikan aspirasi atau pendapat hanya kelompok masyarakat yang mengetahui informasi tersebut dan aktif bersosialisasi di lingkungan tetangga, sedangkan untuk kelompok masyarakat yang tidak aktif bersosialisasi kurang berpartisipasi. Hal ini terlihat dalam pola hubungan pasangan variabel ketiga yaitu antara cara mendapatkan informasi mengenai relokasi dari pemerintah dan cara menyampaikan aspirasi. Masyarakat yang menjawab tidak mengetahui bagaimana pemerintah menyampaikan informasi terkait relokasi sebagian besar tidak pernah menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Di sisi lain, masyarakat yang mengetahui cara pemerintah menyampaikan informasi sebagian besar pernah pula menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Masyarakat di Kampung Cieunteung yang sering berpartisipasi aktif dengan cara sering menyampaikan pendapat terkait rencana relokasi dan bencana banjir yaitu hanya kelompok masyarakat yang aktif bersosialisasi di lingkungannya dan yang benar-benar mengetahui informasi terkait rencana relokasi dari pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji *Chi Square* dan korelasi *R-Pearson* dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi antara persepsi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya masih rendah (yaitu  $<0.5$ ) dan dapat dikatakan memiliki hubungan yang lemah. Dalam hal ini ada faktor-faktor lain yang memiliki hubungan dengan persepsi masyarakat diantaranya:

1. Penyebaran informasi mengenai rencana relokasi yang belum merata  
Masih banyak masyarakat di Kampung Cieunteung yang memandang relokasi sebagai hal yang negatif. Masyarakat masih beranggapan bahwa relokasi permukiman berarti diusir dari lingkungan tempat tinggal saat ini sehingga pandangan terhadap relokasi menjadi buruk. Di sisi lain, pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, belum dapat mensosialisasikan rencana relokasi permukiman secara resmi dan merata kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, banyak kesimpangsiuran mengenai informasi atau pemahaman tentang relokasi yang direncanakan oleh pemerintah.
2. Komunikasi yang masih kurang baik antara pemerintah dengan masyarakat  
Faktor lainnya yang turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap rencana relokasi adalah komunikasi antar *stakeholder* yang belum baik. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kampung Cieunteung maupun pemerintah. Komunikasi antar *stakeholder* yang dimaksud yaitu antara masyarakat dengan pemerintah. Berdasarkan hasil analisis persepsi masyarakat terhadap pemerintah, sebanyak 76,92% responden menilai bahwa setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah hanya didengarkan tetapi tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang buruk antara masyarakat dengan pemerintah karena masyarakat sendiri memiliki persepsi yang kurang baik terhadap pemerintah.

3. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai rencana relokasi yang masih kurang  
 Faktor keterlibatan masyarakat yang masih kurang dalam proses pengambilan keputusan mengenai rencana relokasi oleh pemerintah ditunjukkan pada pengakuan masyarakat yang pernah melakukan demonstrasi untuk menentang rencana relokasi yang diajukan oleh pemerintah dan menghimbau pemerintah untuk segera menyelesaikan usaha normalisasi Sungai Citarum. Berdasarkan hal tersebut terlihat adanya perbedaan pandangan dari masyarakat dan pemerintah terkait rencana relokasi. Ozden (2006) menilai bahwa masalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat dijumpai oleh pihak ketiga yaitu tokoh masyarakat atau LSM. Dengan syarat bahwa pihak ketiga dapat menyampaikan aspirasi seluruh masyarakat dengan baik.

### Kesimpulan

Sebagian besar masyarakat di Kampung Cieunteung menolak isu rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah sebagai upaya menanggulangi bencana banjir. Persepsi terhadap rencana relokasi ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya:

- Aspek fisik dan lingkungan yaitu penilaian masyarakat terhadap kelayakan dan kenyamanan desa,
- Aspek ekonomi yaitu kekhawatiran masyarakat terhadap penggantian aset lahan dan bangunan dan kekhawatiran terhadap mata pencaharian di lingkungan permukiman yang baru,
- Karakteristik internal masyarakat, yaitu umur yang turut mempengaruhi persepsi dan preferensi masyarakat,
- Aspek sosial dan budaya yaitu kekhawatiran terhadap hubungan sosial yang sudah terjalin dan mungkin tidak didapatkan lagi di lingkungan permukiman yang baru.

Secara umum, faktor-faktor yang dianggap turut mempengaruhi persepsi masyarakat diantaranya:

- Proses penyebaran informasi mengenai rencana relokasi kepada masyarakat,
- Komunikasi antar *stakeholder* yaitu antara masyarakat dan pemerintah, dan
- Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

### Daftar Pustaka

- BBWS Citarum Kementerian PU. (2011) *Peta Informasi Citarum. Roadmap Coordination and Management Unit*. (2011) *Penanganan Banjir Sungai Citarum Hulu*.
- Carter, W. N. (1991) *Disaster Management : A Disaster Manager's Handbook*. Manila: Asian Development Bank.
- Dikmen, N. (2006) *Relocation or Rebuilding in the Same Area: An Important Factor for Decision Making for Post-Disaster Housing Projects*. Unpublished Report. Montreal: University of Montreal.
- Eriyanto. (2007) *Teknik Sampling: Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Kodoatie, R. J., Sjarief, R. (2010) *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Koentjaraningrat. (1997) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kountur, R. (2007) *Metode Penelitian*. Jakarta: PPM.
- Ozden, A. T. (2006) *Developing A Model For Community Involvement in Post-Disaster Housing Programmes*. Unpublished Report. Montreal: University of Montreal.
- Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah

- Quarantelli, E. (1999a) *Social Problems of Adjustment and Relocation: Some Questions and Some Comments*.
- Quarantelli, E. (1999b) *The Disaster Recovery Process: What We Know And Do Not Know From Research*.
- Ramli, S. (2010) *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sawitri, Dewi. (2009) *Modul Kuliah: Analisis Statistik Asosiasi*. Bandung: Perencanaan Wilayah dan Kota ITB.
- Sechermerhorn, J. R. (2010) *Organizational Behavior 12th Edition*. United States: Wiley.
- Tercan, Binali (2001) *Post Earthquake Relocation Process in Yalova*, Unpublished Master's Thesis, METU, Ankara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007
- Usamah, M., Haynes, K. (2011) *An Examination of The Resettlement Program at Mayon Volcano: What Can We Learn for Sustainable Volcanic Risk Reduction?* Springer .
- Walpole, Ronald E. (1990) *Pengantar Statistika*. Jakarta: Gramedia
- Whiteford, L. M., Tobin, G. A. (2004) *Saving Lives, Destroying Livelihoods: Emergency Evacuation and Resettlement Policies*. 189.
- Yulaelawati, E., Syihab, U. (2008) *Mencerdasi Bencana: Banjir, Tanah Longsor, Tsunami, Gempa Bumi, Gunung Api, Kebakaran*. Jakarta: Grasindo.